

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem politik Indonesia rakyat adalah pemegang kedaulatan yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR, oleh karena itu praktek-praktek penyelenggaraan negara harus bersumber dari kehendak rakyat dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kenegaraan.<sup>1</sup> Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi memiliki pemikiran mendasar mengenai konsep partisipasi politik. Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan bahwa kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).<sup>2</sup>

Partisipasi masyarakat dalam dunia politik sangat menentukan laju pembangunan negara tersebut. Pembangunan sebuah negara pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat tidak lagi menjadi obyek pembangunan melainkan sudah menjadi subyek pembangunan. Peran serta masyarakat sangat menentukan berhasil tidaknya program-program pemerintah yang dijalankan khususnya dalam hal politik.

---

<sup>1</sup> Budiardjo, Miriam dan Ambong, ibrahim. 1993. Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>2</sup> Rahma, Dewi. 2014. *Fungsi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 2009-2014*. [http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity\\_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/JURNAL-UPLOAD-KAK-DEWI.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/JURNAL-UPLOAD-KAK-DEWI.pdf). Tanjung Pinang. 11 Desember 2016 11:43 WIB

Peran serta masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup bangsa dan negara perlu adanya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tentang peningkatan taraf hidup melalui politik. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan politik masih dinomorduakan. Perempuan selalu diasosiasikan mengambil peran sebatas urusan-urusan domestik yang hanya seputar urusan rumah tangga, Hal ini bukan suatu kebetulan tapi sudah menjadi konstruksi budaya yang sudah menjadi tradisi dan merugikan pihak perempuan, karena akan berimbas kepada ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam kehidupan politik. Negara yang masyarakatnya masih tergolong tradisional, perempuan ditempatkan pada posisi yang dilirik setelah kelompok laki-laki. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Kehidupan keseharian dalam konstruksi budaya memiliki kontribusi yang kuat dalam memposisikan peran laki-laki terhadap perempuan.

Demokrasi telah terbuka dengan luas dan peluang perempuan untuk turut mengaktualisasikan dirinya juga telah dijamin. Undang-undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang kuota 30% keterwakilan perempuan, sebagai salah satu syarat bagi pencalonan anggota legislatif oleh partai politik tentunya secara logika mampu mendobrak stagnasi kuantitas perempuan di wilayah publik.<sup>3</sup> Sejalan dengan perkembangan zaman, perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-undang tersebut, yang menyebutkan pentingnya

---

<sup>3</sup>Rahma, Dewi .Ibid.Hal 7

aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% untuk seluruh calon partai pada parlemen baik di tingkat Nasional maupun lokal , seperti yang tertuang dalam UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Demokrasi terbuka pada saat ini semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam politik. Masyarakat secara langsung bisa ikut menentukan keberhasilan suatu negara. Partisipasi tersebut dilakukan melalui politik. Partisipasi politik bisa dilakukan melalui partisipasi dalam lembaga pemerintahan diantaranya DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Dewan perwakilan rakyat daerah mengundang arti penting dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab. Seperti yang dirumuskan dalam UU No 32 Tahun 2004, dengan kata lain bahwa DPRD merupakan lembaga yang berperan sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan sosial.<sup>4</sup>

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, di dalamnya , mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non

---

<sup>4</sup>Meta. 2011. *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pembangunan Partisipasi Masyarakat*. <https://kodimbyssel.wordpress.com/peran-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-dalam-pembangunan-partisipasi-masyarakat/>. Surabaya. 11 desember 2016 11:34 WIB

diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik.<sup>5</sup>

Kebijakan afirmasi (affirmative action) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."<sup>6</sup> Penerapan affirmative action terhadap perempuan dalam politik dan Pemilu ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>5</sup> Mulyono, Ignatius. 2016. *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*.  
[http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah\\_STRATEGI\\_MENINGKATKAN\\_KETPERWAKILAN\\_PEREMPUAN\\_\\_Oleh\\_Ignatius\\_Mulyono.pdf](http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETPERWAKILAN_PEREMPUAN__Oleh_Ignatius_Mulyono.pdf). Jakarta 08 maret 2017  
16.58 WIB

<sup>6</sup> Mulyono, Ignatius. Ibid. hal. 2

**Tabel.1.1 Peningkatan Keterwakilan Perempuan dengan Adanya Penerapan Affirmative Action.**

Jenis kelamin	1999-2004	2004-2009	2009-2014
Perempuan	9,0%	11,8%	18, %
Laki-laki	91,0%	88.2%	82, %
	Tanpa affirmative Action	Dengan affirmative action kuota 30%	Dengan affirmative Action kuota 30% dan zipper system 1 diantara 3 bakal calon.

Sumber : Sekretariat Jendral DPR-RI dan komisi pemilihan umum

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya dengan adanya kebijakan afirmasi (affirmative action) keterwakilan perempuan mengalami peningkatan.

**Tabel.1.2 Keterwakilan Perempuan di DPR RI Pusat Mulai dari Tahun 1992 Hingga Tahun 2009 .**

Jumlah keterwakilan perempuan anggota DPR RI Tahun 1992-2009 periode	Total anggota DPR	Jumlah Anggota perempuan	Persentase (%)
1992	500	62	12,50
1997	500	54	10,80
1999	500	45	9,00
2004	550	61	11,09
2009	560	101	17,86

Sumber : Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif mengalami peningkatan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kaum perempuan sudah mulai untuk terjun berpartisipasi aktif di dalam kegiatan politik. Adapun tabel yang menunjukkan bahwasannya ada keterwakilan perempuan di DPRD Kota Batu sebagai berikut :

**Tabel.1.3 Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Batu**

**mulai Tahun 2002 sampai 2014**

No	Tahun	Jumlah anggota legislatif perempuan
1	2002 - 2004	3 Orang
2	2004 – 2009	2 Orang
3	2009 – 2014	7 Orang
4	2014 – 2019	6 Orang

Sumber : Risalah Kota Batu

Berdasarkan tabel diatas anggota legislatif perempuan di Kota Batu mulai tahun 2002 sampai 2019 sudah ada keterwakilan anggota legislatif perempuan di setiap periodenya. Begitu juga dengan DPRD yang ada di Kota Batu saat ini Sudah ada anggota legislatif perempuan yang sudah menduduki kursi anggota legislatif. Hal ini membuktikan bahwasannya perempuan sudah ikut serta dalam bidang politik.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yang ada di DPRD Kota Batu mengalami perubahan yang cukup baik , buktinya dengan adanya affirmative action kuota 30% yang di putuskan oleh pemerintah Kota Batu sekarang sudah ada anggota dewan perempuan yang menduduki kursi DPRD Kota Batu , Tepatnya ada 6 anggota legislatif perempuan yang ada di DPRD Kota Batu yaitu Hj. Dewi Kartika dari partai PKB, Katarina dian Nefiningtyas dari partai Gerindra, Nur Aulia Lishanti dari partai PAN, Shannti Vitria Desi ST,SH dari partai GOLKar ,R.R Reni Agustini. SH dari partai PAN dan Hj. Endang Susilaning Rahayu dari partai PDI perjuangan . Kota batu adalah salah satu Kota baru yang berdiri sendiri dan sekarang sudah mengalami peningkatan yang cukup baik dalam bidang pembangunan

dan lain sebagainya, dengan kata lain disini Anggota legislatif DPRD Kota Batu juga berperan dalam hal ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalahnya adalah :  
“Bagaimana mekanisme kerja modalitas anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Batu dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Batu ?”

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian adalah keinginan-keinginan penulis atas hasil penelitian dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui mekanisme kerja modalitas anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Batu dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif.”

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Sosiologi Politik tentang Legislatif khususnya tentang fungsi legislatif di DPDR Kota Batu dan mengembangkan teori Modalitas Pierre bourdieu.

### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai referensi mahasiswa Sosiologi yang ingin meneliti Tentang Fungsi legislatif perempuan sebagai anggota Legislatif.

## **1.5 Definisi Konsep**

### **1.5.1 Mekanisme Kerja Modalitas**

Mekanisme berarti beberapa metodologi yang disusun secara sistematis. Jadi, mekanisme kerja adalah serangkaian metodologi atau perangkat dalam untuk mencapai tujuan. Kemudian, salah satu mekanisme kerja ini adalah bagaimana menyusun manajemen kerja yang baik agar tujuan bisa tercapai. Menurut George R. Terry, ada 4 poin manajemen kerja yang baik yaitu:

1. Planning (Perencanaan): Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah tertentu.
2. Organizing (Pengorganisasian): Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki.
3. Actuating (Penggerak): Actuating (penggerakan) meliputi kepemimpinan dan koordinasi. Kepemimpinan yakni gaya memimpin dari sang pemimpin dalam mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya organisasi agar mengarah pada pencapaian tujuan program dan organisasi.
4. Controlling (Pengawasan): Controlling bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas, namun juga mengawasi sehingga bila perlu dapat mengadakan koreksi. Inti dari



controlling adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana.<sup>7</sup>

Modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicaranya. Sikap ini dapat berupa pernyataan kemungkinan, keinginan, atau keizinan.<sup>8</sup> Mekanisme Kerja Modalitas adalah serangkaian metodologi atau perangkat dalam untuk mencapai tujuan, Serangkaian metodologi ini berupa keinginan seseorang yang ingin mencapai suatu tujuan yang mereka ingin lakukan.

### **1.5.2 Fungsi Anggota Legislatif (DPR)**

Tugas (Fungsi) DPR sesuai dengan UUD 1945 adalah membentuk undang-undang bersama-sama dengan presiden, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama presiden dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan atas kebijakan pemerintah.<sup>9</sup> Fungsi legislatif di dalam sistem ketatanegaraan di pegang oleh presiden dan DPR. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR juga berhak mengajukan rancangan undang-undang, seperti yang di tetapkan dalam pasal 21 ayat (1) UUD 1945, tetapi

---

<sup>7</sup> Kahar Maharani putri .2014. *Prinsip dan Mekanisme Kerja Organisasi*.  
<http://maharaniputrikahar.blogspot.co.id/2014/10/prinsip-dan-mekanisme-kerja-organisasi.html>. Makassar.22 juli 2017 14:23

<sup>8</sup> Idris Sulistiany nuny.2009. *Hwal Aspektualitas, Temporalitas, Dan Modalitas Dalam Bahasa Indonesia*.[http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR.\\_PEND.\\_BHS.\\_DAN\\_SASTRA\\_INDO\\_NESIA/196707151991032-NUNY\\_SULISTIANY\\_IDRIS/TEMPORALITAS.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDO_NESIA/196707151991032-NUNY_SULISTIANY_IDRIS/TEMPORALITAS.pdf). Bandung. 4 agustus 2017 19:29

<sup>9</sup> Budiarjo,Miriam Dan ambong,Ibrahim.*Op,Cit*.hal 7 01 januari 2017 21 :11WIB

untuk sahnya rancangan undang-undang yang di ajukan DPR itu menjadi Undang-Undang, harus ada persetujuan Presiden seperti yang ditetapkan di dalam pasal 21 ayat (2).<sup>10</sup>

### 1.5.3 Anggota Legislatif (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu Lembaga Tinggi Negara , merupakan wahana untuk melakukan demokrasi.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan DPR adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.<sup>12</sup>

## 1.6 METODE PENELITIAN

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Guba, sementara itu Krik dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif

---

<sup>10</sup> Budiarmo, Miriam Dan ambong, Ibrahim. *Loc.cit.* hal 8

<sup>11</sup> Budiarmo, Miriam Dan ambong, Ibrahim. *Loc.cit.* hal 7

<sup>12</sup> Lailialfiati. 2013. *Peran Kebijakan dalam Meningkatkan Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen* . <http://lailialfiati.blogspot.co.id/2013/12/peran-kebijakan-dalam-meningkatkan.html> .Jember. 02 desember 2016 10:58

sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Fraenkel dan Wallen menyatakan bahwa penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material disebut penelitian kualitatif, dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu.<sup>13</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah penelitian deskriptif. Deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara terperinci. Penelitian deskriptif juga dapat diidentikkan sebagai penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (fact finding).<sup>14</sup>

### **1.6.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan Di kota Batu tepatnya di DPRD kota Batu yakni di Jl. Hasanuddin, Junrejo, Kecamatan Batu Jawa Timur- Indonesia karena DPRD di batu ini adalah salah satu kota yang sudah bisa berdiri sendiri. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang

---

<sup>13</sup> Saputra, Uhar, Suhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama Hlm. 181

<sup>14</sup> Muri, A, Yusu. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana. hal. 62. 22 februari 2017 12:34

terpisah dari Kabupaten Malang. Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa.<sup>15</sup>

#### **1.6.4 Teknik Penentuan Subjek Penelitian**

Penentuan subjek penelitian dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>16</sup> Peneliti harus mengambil sampel berdasarkan tujuan tertentu, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai subjek yang dipilih Adalah :

- a) Anggota legislatif DPRD Kota Batu
- b) Jenis Kelamin (Perempuan )

Sudah jelas bahwasannya subjek yang akan diteliti adalah Anggota Legislatif perempuan yang ada di kota batu dan berjenis kelamin perempuan adapun informan yang dipilih antara lain :

- a) Anggota DPRD Perempuan Kota Batu
- b) Ketua Komisi DPRD Kota Batu
- c) Ketua Risalah DPRD kota Batu

Alasan peneliti mengambil informan tersebut untuk mendapatkan data berkaitan dengan keterlibatan Anggota Legislatif perempuan di DPRD Kota Batu.

---

<sup>15</sup> Humas Kota batu. 2016. *Sejarah kota wisata batu*. <http://humas.batukota.go.id/sejarah-kota-wisata-batu/> jumat 11 november 2016 04.30

<sup>16</sup> Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian” Suatu Pendekatan Praktik”*. Jakarta:PT.Rineka Cipta. Hlm 183.rabu 22 februari 2017.11.06

### **1.6.5 Sumber Data**

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya.<sup>17</sup> Hasil yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti berupa teks hasil wawancara mendalam. Data primer yang didapat dengan melakukan pengamatan dan terlibat dalam kegiatan anggota legislatif dalam menjalankan fungsinya di DPRD kota Batu, seperti foto-foto pelaksanaan sidang, hasil wawancara dengan informan.

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.<sup>18</sup> Data sekunder dapat berupa catatan-caratan penunjang, literatur, buku-buku perpustakaan, jurnal, dokumen resmi berkaitan dengan Fungsi Legislatif Perempuan sebagai anggota legislatif di DPRD kota Batu.

### **1.6.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **a) Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang

---

<sup>17</sup> Prastowo, Andi. 2014. *Memahami Metode-metode Penelitian*. jogjakarta: Ar-Ruzz Media.  
Hal. 31. Rabu 22 februari 2017. 11.28

<sup>18</sup> Prastowo, andi Ibid .hal 32

yang menjadi sasaran penelitian,tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.<sup>19</sup> Observasi juga ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memeberikan sesuatu kesimpulan atau diagnosis. Menurut Cartwright dan Cartwright dalam Herdiansyah (2010) mendefinisikan observasi suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.<sup>20</sup>

#### **b) Wawancara**

Model wawancara dapat dilakukan meliputi wawancara tak berencana yang berfokus dan wawancara sambil lalu. Wawancara tak berencana berfokus adalah pertanyaan yang di ajukan secara tidak terstruktur, namun selalu berpusat pada satu pokok masalah tertentu. Wawancara sambil lalu adalah wawancara yang tertuju kepada orang-orang yang dipilih tanpa melalui seleksi terlebih dahulu secara teliti,tetapi di jumpai secara kebetulan.<sup>21</sup> Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian dan kegiatan subjek penelitian. Penelitian kulaitatif di perlukan suatu wawancara mendalam (*in-deph interview*), baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan pengumpulan data.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Idrus,Muhammad.2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial (pendekatan kualitatif dan kuantitatif)* edisi kedua.yogyakarta:Erlangga.Hlm.101

<sup>20</sup>Saputra,uhar,suhar.2012.Loc.Cit. Hlm.209

<sup>21</sup> Idrus,muhammad .2009.*Op.Cit.*Hlm.104

<sup>22</sup> Saputra,uhar,suhar.2012.Loc.cit Hlm.213

### c) Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis dan dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang penting dalam analisis konsep dan studi bersejarah.<sup>23</sup> Dokumen (Belanda= document), dalam arti sempit adalah Surat, akta, piagam, surat resmi lain baik tertulis atau yang teretak memberi keterangan untuk penyelidikan ilmiah (pengertian dalam KUBI. Dokumentasi dalam arti luas adalah segala macam benda yang dapat memberi keterangan yang sifatnya tidak terbatas hanya tertulis atau tercetak saja, jadi sebagai bukti tertulis Dokumen merupakan bukti asli yang berguna untuk mendukung kebenaran atau keaslian suatu keterangan.<sup>24</sup>

#### 1.6.7 Teknik Analisa Data

Penelitian kualitatif data di peroleh dari berbagai sumber, dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus hingga datanya jenuh (tidak diperoleh lagi data baru). Pengamatan yang terus-menerus tersebut, mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi sekali. Perlu di garis bawahi bahwa pada dasarnya analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, kemudian di carikan data lagi secara berulang-ulang sehingga

---

<sup>23</sup> Saputra, uhar, suhar 2012. *Loc. Cit.* Hlm. 215

<sup>24</sup> Yuni, Nurjannah. 2013. *Dasar-dasar Dokumentasi*.

<https://mashumdotnet.files.wordpress.com/2013/10/presentasidokumentasi.pdf>. Tanggal 08 januari 2017 16:22

kemudian dapat disimpulkan.<sup>25</sup> Analisa data menggunakan model Interaktif Miles dan Herberman yang terdiri dari 3 tahapan:

### 1) Reduksi Data

Pengurangan data dapat dilakukan selama tahap analisis data. Untuk pelaksanaannya, langkah ini tidak membutuhkan perhitungan yang rumit yaitu membentuk data yang tersedia menjadi satu bentuk yang perlukan oleh teknik analisis yang di gunakan, ada dua kemungkinann pengurangan data ,yaitu dengan statistik dan atau dengan hanya menghilangkan hal-hal yang tidak relevan.<sup>26</sup> Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992:16)). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Prastowo,Andi.2014.*Op,Cit.* Hal.36.Rabu 22 februari 2017.11.32

<sup>26</sup> Prastowo,Andi.2014.*Op,Cit.* Hal.96

<sup>27</sup> Sari,N.2013.*Metode penelitian.* [http://eprints.undip.ac.id/40737/3/004\\_BAB\\_III.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40737/3/004_BAB_III.pdf)19. 01 2017 WIB



## **2) Data Display**

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal, dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

## **3) Kesimpulan/ Verifikasi**

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi, sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data,

penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

#### **1.6.8 Uji Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmasi, dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Prastowo, Andi. 2014. *Op, Cit.* Hal. 37. Rabu 22 februari 2017. 12:57